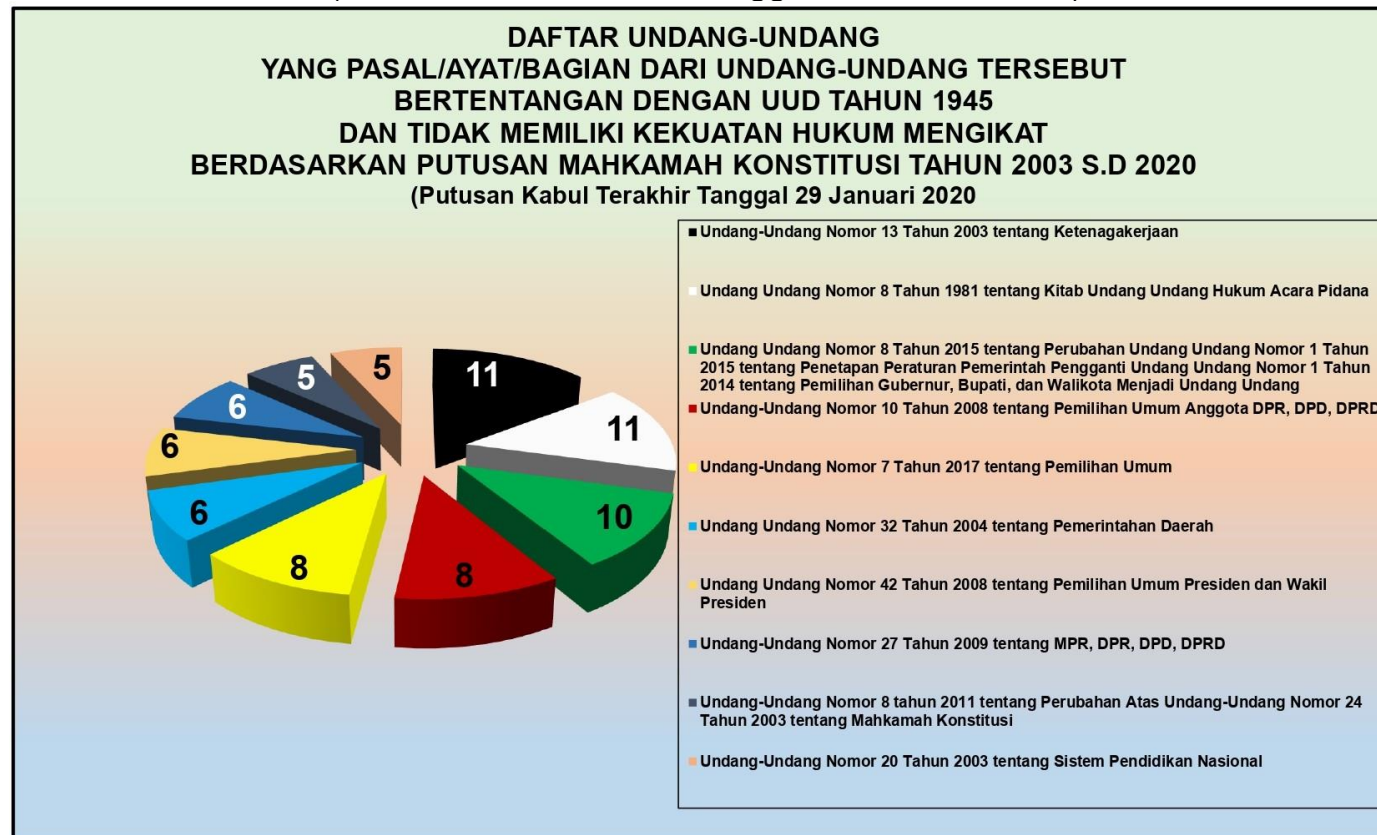




**SEKRETARIAT JENDERAL & BADAN KEAHLIAN DPR RI
PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG**

**DAFTAR UNDANG-UNDANG
YANG SELURUHNYA DAN/ATAU SEBAGIAN MATERINYA
DINYATAKAN BERTENTANGAN DENGAN UUD TAHUN 1945 DAN TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT
BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
TAHUN 2003 s.d 2020
(Putusan Kabul terakhir tanggal 29 Januari 2020)**





**SEKRETARIAT JENDERAL & BADAN KEAHLIAN DPR RI
PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG**

KETERANGAN TABEL

JUMLAH = 125 UU

UU bertentangan dengan UUD Tahun 1945

UU tidak berlaku karena telah diganti/dicabut dengan UU baru

**100 UU
MASIH BERLAKU**

**25 UU
TIDAK BERLAKU**

NO.	DAFTAR UNDANG-UNDANG	JUMLAH PUTUSAN
1.	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana	11
2.	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	11
3.	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang	10
4.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	8
5.	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD	8
6.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah	6
7.	Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden	6
8.	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD	5
9.	Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	5
10.	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	5
11.	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat	5
12.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah	4
13.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)	4
14.	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	4
15.	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik	4
16.	Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-	



**SEKRETARIAT JENDERAL & BADAN KEAHLIAN DPR RI
PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG**

	Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	4
17.	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	4
18.	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD	3
19.	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang	3
20.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD	3
21.	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi	3
22.	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum	3
23.	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	3
24.	Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	3
25.	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	3
26.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	3
27.	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran	3
28.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	2
29.	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial	2
30.	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan	2
31.	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional	2
32.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara	2
33.	Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	2
34.	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri	2
35.	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	2
36.	Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama	2
37.	Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum	2



**SEKRETARIAT JENDERAL & BADAN KEAHLIAN DPR RI
PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG**

38.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	2
39.	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara	2
40.	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia	2
41.	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi	2
42.	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh	2
43.	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	2
44.	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan	2
45.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan	2
46.	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang	2
47.	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung	2
48.	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan	2
49.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	2
50.	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	2
51.	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	2
52.	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	1
53.	Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menjadi Undang-Undang	1
54.	Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara	1



**SEKRETARIAT JENDERAL & BADAN KEAHLIAN DPR RI
PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG**

55.	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan	1
56.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD	1
57.	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang	1
58.	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum	1
59.	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial	1
60.	Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan	1
61.	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	1
62.	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan	1
63.	Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan terhadap Barang-Barang Cetak yang Isinya dapat Mengganggu Ketertiban Umum	1
64.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal	1
65.	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan	1
66.	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat di Kabupaten Papua Barat	1
67.	Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999	1
68.	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan	1
69.	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang APBN Tahun Anggaran 2006	1
70.	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang APBN Tahun Anggaran 2007	1
71.	Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang APBN Tahun Anggaran 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2008	1
72.	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan	1
73.	Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia	1
74.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman	1



**SEKRETARIAT JENDERAL & BADAN KEAHLIAN DPR RI
PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG**

75.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman	1
76.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	1
77.	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan	1
78.	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian	1
79.	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang APBN Tahun Anggaran 2012	1
80.	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman	1
81.	Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman	1
82.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian	1
83.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara	1
84.	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa	1
85.	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani	1
86.	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	1
87.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak	1
88.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1
89.	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja	1
90.	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak	1
91.	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional	1
92.	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris	1
93.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran	1
94.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup	1
95.	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan	1
96.	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai	1
97.	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara	1
98.	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku	1
99.	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas	1
100.	Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit	1



SEKRETARIAT JENDERAL & BADAN KEAHLIAN DPR RI
PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG

101.	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara	1
102.	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik	1
103.	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung	1
104.	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi	1
105.	Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat	1
106.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1954 tentang Hak Angket DPR	1
107.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	1
108.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air	1
109.	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah tiga kali, terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah	1
110.	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan	1
111.	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun	1
112.	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah	1
113.	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan	1
114.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat	1
115.	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan	1
116.	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	1
117.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau	1
118.	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	1
119.	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	1
120.	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia	1
121.	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi	1



SEKRETARIAT JENDERAL & BADAN KEAHLIAN DPR RI
PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG

122.	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	1
123.	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme	1
124.	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional	1
125.	Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia	1